

BANYAK SERANG ANAK USIA SD

Warga Diimbau Waspadai Penularan Gondongan

YOGYA (KR) - Dinas Kesehatan Kota Yogya mengimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai penyakit gondongan atau parotitis. Sebagian besar penderitanya menyerang siswa Sekolah Dasar (SD) di wilayah Kota Yogya. Gondongan merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, terutama menyerang pada anak-anak.

Kepala Seksi Pengendalian Penyakit Menular (P2M) dan Imunisasi Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta Endang Sri Rahayu, mengungkapkan ada sekitar 169 kasus gondongan di Kota Yogya yang sebagian besar merupakan anak-anak SD. Endang menyebutkan, gondongan ditandai dengan pembengkakan di sekitar rahang atau leher akibat peradangan kelenjar parotis. Untuk gejala awal yang muncul antara lain demam, sakit kepala, nyeri saat mengunyah atau menelan, dan nyeri otot.

"Penyakit ini sangat mudah menular, terutama di lingkungan sekolah melalui percikan air liur atau kontak dengan benda yang terkontaminasi," jelasnya, Kamis (31/10).

Untuk itu, Dinas Kesehatan Kota Yogya memberikan imbauan kepada pihak sekolah dan orangtua untuk me-

ningkatkan kewaspadaan. "Penderita cenderung karena kurangnya menjaga perilaku bersih dan sehat karena penyakit ini sangat mudah menular. Karena itu, imbauan kami untuk yang sakit, sebaiknya tidak masuk sekolah," ungkapnya.

Dirinya juga berharap agar para orangtua memastikan bahwa anak-anak mereka telah mendapatkan vaksinasi Measles, Mumps, Rubella (MMR). Pemberian vaksin MMR ini dapat mencegah terjadinya gondongan. Sehingga jika terjadi peningkatan kasus gondongan diharapkan pihak sekolah bekerja sama dengan puskesmas setempat dalam memantau dan menangani kasus tersebut.

Ketua Tim Kerja Surveilans Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Kesehatan yang juga selaku Epidemiolog di Dinas Kesehatan Kota Yogya

Solikhin Dwi, menyebutkan penyakit parotitis atau gondongan termasuk dalam kategori kejadian luar biasa secara epidemiologis. Menurutnya penyakit tersebut sangat meningkat dibandingkan tahun lalu. Pada tahun 2023 tidak ada kasus ditemukan, sementara di tahun 2024 sampai 30 Oktober 2024 ditemukan 169 kasus. "Periode akhir September hingga minggu ketiga Oktober 2024 tidak terdeteksi kasus. Namun pekan ini naik lagi dan jumlah penderitanya 169 orang yang rata-rata diderita oleh anak usia SD," ungkapnya.

Ia berharap, para orangtua dan sekolah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Sehingga angka penderita gondongan semakin berkurang di Kota Yogya.

"Pencegahan dapat dilakukan dengan cuci tangan memakai sabun dengan air mengalir secara rutin sebelum makan atau setelah berada dari tempat atau lingkungan yang berisiko. Kemudian tidak berbagi peralatan mandi atau makan dengan penderita gondongan serta menerapkan etika batuk seperti menutup mulut dan hidung," terangnya. **(Dhi)-f**

DPP LVRI SOSIALISASIKAN JSN 45

Banyak yang Belum Memahami Veteran

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) terus menyosialisasikan Jiwa, Semangat dan Nilai-nilai 1945 (JSN 45) kepada masyarakat. Kali ini kepada guru-guru SMA/SMK se Kota Yogyakarta di Hotel Cavinton Yogyakarta, Rabu (30/10), harapkan guru menularkan kepada para siswanya. Sosialisasi disampaikan oleh Mayjen TNI Mar (Purn) Nono Sukarno dari Departemen Pewarisan JSN 45, DPP LVRI.

Kepala Departemen Kominfo DPP LVRI, Marsda TNI (Purn) H Tumiyo SE menuturkan, bahwa tugas pokok LVRI adalah mewariskan JSN 45 kepada masyarakat terutama para generasi muda penerus bangsa. Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang belum memahami tentang veteran. "Veteran RI adalah WNI yang pernah bergabung dalam angkatan bersenjata resmi dan pernah berperang melawan negara luar. Tentara belum tentu veteran," katanya.

Dijelaskan Tumiyo, Veteran RI terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu Veteran Pejuang Kemerdekaan RI (tahun 1945-1949), Veteran Pembela Kemerdekaan RI, Veteran Perdamaian RI dan Veteran Anumerta yang gugur dalam peperangan.

Untuk Veteran Pembela Kemerdekaan RI sendiri terbagi menjadi tiga yaitu Veteran Pembela Trikora



KR-Devid Permana

Mayjen TNI Mar (Purn) Nono Sukarno saat menyosialisasikan JSN 45 kepada para guru.

(tahun 1961-1963) yang terlibat dalam operasi Trikora mengusir penjajah Belanda di Irian Barat. Kemudian Veteran Pembela Dwikora (1964-1966) melawan Malaysia dan Veteran Seroja yang berperang membebaskan Timor Timur dari Portugis (1975-1976).

Adapun Veteran Perdamaian RI adalah WNI yang berperan aktif dalam pasukan internasional di bawah PBB dalam rangka melaksanakan misi perdamaian dunia. "Veteran Perjuangan dan Pembela Kemerdekaan jumlahnya terus berkurang karena rata-rata sudah usia lanjut, sedangkan Veteran Perdamaian banyak yang berusia muda dan masih aktif berdinasi di militer, saat pulang ke tanah air, mereka juga termasuk veteran," katanya.

Lebih lanjut dikatakan Tumiyo, para veteran ini memiliki sebuah wadah berorganisasi yaitu LVRI. Meskipun sudah berusia lanjut, para veteran selalu berse-

mangat untuk menyosialisasikan JSN 45 yang di dalamnya memuat nilai-nilai rela berkorban, pantang menyerah dan cinta tanah air. Hal inilah yang perlu ditanamkan kepada para generasi muda.

"Melalui sosialisasi JSN 45 ini, kami berharap masyarakat tahu dan paham bahwa siapa yang mengantarkan kemerdekaan RI adalah para veteran. Bahwa kemerdekaan diraih dengan penuh perjuangan yang dilakukan oleh para veteran," katanya.

Menurut Tumiyo, Presiden RI Prabowo Subianto juga merupakan veteran. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan perlunya menghargai peran penting para pejuang/veteran yang telah memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI. "Kita tidak ingin dikasihani, tetap kami punya semangat yang perlu dimaksimalkan dan itu butuh perhatian dari pemerintah," katanya. **(Dev)-f**

PEMDA DIY KOMITMEN TURUNKAN STUNTING

Wujudkan Target Nasional Sebesar 14 Persen

YOGYA (KR) - Meski DIY berada di lima besar terbaik penanganan stunting di Indonesia, tapi Pemda DIY terus berupaya mewujudkan target nasional angka stunting sebesar 14 persen. Sebagai bentuk keseriusan target tersebut diharapkan dapat terwujud pada akhir 2024.

Hal itu menjadi tantangan besar yang membutuhkan respons cepat dan tepat. Melalui dasar hukum yang kuat seperti Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021, Forum Koordinasi Percepatan Penurunan Stunting (FKPPS) DIY, telah menyusun berbagai strategi untuk melakukan langkah kolaboratif lintas sektor dalam upaya mencapai target tersebut.

"Pencegahan stunting menjadi pemikiran kita bersama, jadi Pemda

DIY tidak bisa sendirian. Dengan adanya penguatan kolaborasi pentahelix untuk percepatan penurunan stunting, mari berkolaborasi demi tujuan bersama," kata Wakil Gubernur (Wagub) DIY Sri Paku Alam X dalam Forum Koordinasi PPS DIY, di Hotel Grand Rohan, Rabu (30/10).

Menurutnya, menurunkan stunting memang bukan pekerjaan yang ringan dan mudah. Harus ada upaya mengubah mindset dan merubah local wisdom yang agak terdeviasi terkait dengan asupan gizi anak. Pekerjaan itu harus ditangani lintas sektor. Dimulai dari strategi perencanaan, koordinasi dan pemanfaatan data dan teknologi informasi. "Perubahan perilaku sekaligus pendampingan keluarga juga menjadi hal yang penting dilakukan. Tidak perlu

strategi yang muluk-muluk, yang penting dimengerti dan dipahami masyarakat sehingga kesadarannya bisa tumbuh," ungkapnya.

Wagub DIY berkomitmen untuk terus mengadakan monitoring dan informasi berkelanjutan guna memastikan bahwa setiap intervensi dan program berjalan sesuai dengan rencana. Semua itu dilakukan untuk mencapai indikator yang ditetapkan. Selain itu juga wajib ada benchmarking dan milestone, serta evaluasi dalam tiap langkah.

Sedangkan Kepala BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah menyatakan, penguatan kolaborasi pentahelix untuk percepatan penurunan stunting adalah tema yang diambil pada pertemuan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) DIY. **(Ria)-f**

Tenaga Kerja di DIY Didominasi Sarjana

YOGYA (KR) - Tenaga kerja DIY harus bisa selaras dengan kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Hal ini sesuai dengan arah transformasi sosial DIY, di mana penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan vokasi menjadi salah satu kebijakannya.

"Kondisi riilnya, saat ini tenaga kerja di DIY didominasi oleh lulusan sarjana. Tentunya harus kita carikan solusi bagaimana agar tenaga kerja ini bisa terserap penuh oleh dunia usaha dan industri. Salah satu caranya ialah dengan merevitalisasi pendidikan vokasi kita," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Beny Suharsono dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) DIY di Ruang Radyosuyoso, Kompleks Kepatihan, Kamis (31/10).

Rakor bertujuan untuk membangun kesepahaman dan komitmen bersama tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya sinergi dan kerjasama antar pihak yang dapat dilakukan sebagai bentuk optimalisasi pendidikan

dan pelatihan vokasi. Beny mengatakan, penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan atau vokasi akan dilakukan berbasis kondisi lokal potensi dan keunggulan daerah.

"Pemda DIY akan semakin menguatkan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi, serta peningkatan insentif fiskal dan non fiskal bagi investasi di kawasan selatan. Tentunya untuk memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat," imbuhnya.

Sedangkan Kepala Bappeda DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti menyatakan, keberhasilan pembangunan di bidang ketenagakerjaan menjadi salah satu faktor kunci tercapainya tujuan pembangunan perekonomian di DIY. Tenaga kerja

adalah salah satu faktor produksi yang memiliki peran sentral dalam menggerakkan aktivitas perekonomian.

"Tenaga kerja yang produktif akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. SDM yang memiliki akses atas pekerjaan yang layak akan memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup," ungkapnya.

Menurut Made, pembangunan ketenagakerjaan memberikan dampak langsung pada kesejahteraan dan kualitas hidup penduduk. Namun, pembangunan ketenagakerjaan juga menghadapi tantangan yang perlu diantisipasi sejak awal melalui perencanaan yang berkualitas, holistik, terintegrasi dan kolaboratif. Tantangan pembangunan ketenagakerjaan tersebut, terutama dise-

RALAT IKLAN

Dalam kolom berita 'Mimbar Legislatif' yang terbit di halaman 3, Hari Kamis 31 Oktober 2024. Tertulis Wakil Ketua Komisi D, Muhammad Agussalim. Yang benar Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, Drs Ahmad Agus Sofyan M. Pd.I (PKS)

Kumpulkan Ketua Fraksi se-DIY, Gerindra Siap Kawal Instruksi Gubernur Terkait Miras

YOGYA (KR) - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DIY mengumpulkan ketua-ketua fraksi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kamis (31/10/2024) petang. Partai berlambang burung Garuda ini siap mengawal Instruksi Gubernur (Ingub) DIY nomor 5 tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

RM Gustilantika Marrel Suryokusumo, Wakil Ketua DPD Gerindra DIY, mengatakan pihaknya ingin bergerak cepat mengawal Ingub DIY terkait pengendalian minuman beralkohol. Pasahtla hal tersebut menjadi aspirasi masyarakat yang harus dikawal sampai tahap implementasi di lapangan.

"Ngarsa Dalem kemarin mengumpulkan eksekutif dari seluruh kabupaten kota. Kami warga DIY dan Gerindra adalah warga politik DIY, tugas kami menjembatani aspirasi masyarakat. Kami ada dewan baik provinsi atau kabupaten/kota. Kami bertemu membahas panjang, disepakati kami siap mengawal Ingub tersebut," tegas Marrel.

Partai Gerindra DIY menurut Marrel sudah menyamakan visi untuk mengawal Ingub hingga kabupaten/kota. Legislator Gerindra menurut Marrel siap diajak berkolaborasi untuk mewujudkan



KR - Istimewa

Wakil Ketua DPD Gerindra DIY instruksikan legislator di kabupaten/kota mengawal Ingub DIY nomor 5 tahun 2024 tentang Optimalisasi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

adanya aturan tegas di kabupaten/kota.

"Kami instruksikan di kabupaten/kota untuk siap ketika pemerintah mengajak diskusi dan mencari solusi bersama. Gerindra DIY dan Kabupaten/Kota siap mengawal tindak lanjut Ingub berjalan dengan baik," tandas pria yang juga cucu Sri Sultan HB X ini.

Sekretaris DPD Partai Gerindra DIY, Nur Subiyantoro, menambahkan Ingub 5 tahun 2024 secara terang mengharapkan terciptanya masyarakat damai, sejuk dan rukun di DIY. Predikat Kota Pelajar yang disandang harus bisa diwujudkan dengan baik dengan adanya aturan minuman beralkohol.

"Kabupaten/kota diberi waktu dalam waktu 15 hari untuk mengimplementasikan Ingub tersebut. Karena itu kami panggil legislatif di seluruh ka-

bupaten/kota DIY untuk memantau dan memastikan. Ingub harus ada tindak lanjut sampai tingkat bawah dan berjalan dengan baik," tukasnya.

Terkait peran penting jaga warga yang amanatkan dalam Ingub tersebut, Gerindra DIY juga menyampaikan kesamaan pandangan. Jaga Warga menjadi elemen yang sangat memahami kondisi di wilayahnya sehingga harus terlibat aktif.

"Modal utama kita di DIY adalah gotong royong tanpa mempedulikan siapa, ini saatnya gotong royong dan kami dorong partisipasi memperkuat peran jaga warga. Teman-teman Jaga Warga ini berada di tiap daerah, mereka paling kenal lingkungan mereka sehingga kami setuju untuk dilibatkan," pungkas Marrel. **(Ftxh)-f**

MARWOTO HADI, FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD KOTA YOGYA Tegas Kawal Realisasi SPBE untuk Reformasi Birokrasi



KOTA YOGYAKARTA

Pertanyaannya apakah kemudian amanat SPBE selesai sekadar dengan diberlakukannya atau adanya JSS? Kalau dilihat dari ruang lingkup SPBE yakni rencana induk, proses bisnis, anggaran dan belanja serta sistem data dan informasi elektronik, maka perlu dikaji dalam implementasinya. Pertama, apakah sudah ada regulasi yang mengatur desain dan tata laksana dalam bentuk perda? Jawabannya, eksekutif dan legislatif sudah membuat perda tentang Pemanfaatan dan Pengelolaan TIK. Kenapa harus perda, karena regulasi ini merupakan amanatan yang paling kuat dan 'wajib dilaksanakan' yang kemudian akan memberikan landasan pada aspek anggaran, SDM dan arah kebijakan teknisnya.

Kedua, terkait tata kelola informasi dan data elektronik. Sejauh mana Pemkot be-

YOGYA (KR) - Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dirilis sejak tahun 2018 melalui PP 95/2018. Pada saat itu Pemkot Yogya juga merilis aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai sebuah platform digital pelayanan publik.



KR-Istimewa

nar-benar serius terhadap kebijakan satu data Indonesia, statistik sektoral dan prinsip 'perencanaan berbasis data'. DPRD Kota Yogya melalui Komisi A sudah sedemikian aktif menyuarakan tentang hal itu.

Kedua pertanyaan tersebut penting karena berbicara SPBE ini adalah tentang bagaimana reformasi birokrasi benar-benar memiliki arah yang jelas serta berdampak bagi efektivitas pelayanan dan pelaksanaan pemerintahan. Meskipun dalam prakteknya masih banyak kekurangan di sana-sini namun pada OPD level dinas dan badan mungkin isu-isu SPBE sudah menjadi diskusi yang familiar dan kemudian berproses pada penguatan SDM.

Tetapi pada level pemerintahan di tingkat bawah seperti kementren dan kelurahan diskusinya masih sangat sederhana yakni pada isu SDM. Sudahkan pada level ini tersedia SDM yang mengawal? Baik apapun suatu konsep kebijakan tetapi tidak tersedia SDM yang memadai maka bisa diyakini bahwa kebijakan tersebut hanya akan berhenti sebagai suatu angan-angan. DPR sebagai mitra sekaligus fungsi kontrol pemerintah sepakat untuk mendorong SPBE ini benar-benar dilaksanakan secara serius. **(Dhi)-f**